

Sustainable Landscape Newsletter

Edition 5
June 2017
Light Version

Solidaridad



BUSINESS
WATCH
INDONESIA

EDITORIAL

Connecting People to Nature atau mendekatkan manusia dengan alam, adalah tema yang dipilih untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Tema ini mengajak kita untuk sejenak “keluar” dari kesibukan sehari-hari dan melihat alam, untuk menghargai keindahan dan peran pentingnya, dan untuk ikut beraksi dalam menjaga Bumi dimana kita saling berbagi.

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kita semakin merasakan bahwa kita sangat tergantung pada alam. Jutaan masyarakat pedesaan yang menghabiskan waktu bekerjanya dengan “dekat dengan alam”, memahami benar ketergantungan mereka terhadap ketersediaan air dan bagaimana tanah yang subur merupakan salah satu bentuk pemberian dari alam untuk kesejahteraan mereka. Namun mereka jugalah yang pertama kali menderita jika ekosistem terganggu, baik oleh polusi, perubahan iklim, atau oleh eksploitasi berlebihan.

Kenaikan suhu udara di beberapa wilayah menyebabkan tanaman yang awalnya menjadi komoditas unggulan mulai mengalami penurunan produksi. Sebaran dan variasi tanaman mulai berubah. Bencana alam akibat cuaca ekstrem yang makin sering terjadi, menghambat pertumbuhan ekonomi penduduk. Termasuk sejumlah banjir dan longsor di Banjarnegara sejak bulan April hingga Juni ini yang memutus akses jalan beberapa desa dan menutup sejumlah lahan pertanian.

Pemberian dari alam seringkali sulit dinilai dengan uang. Seperti air dan udara yang bersih, pemberian dari alam digunakan dengan cuma-cuma, setidaknya sampai hal itu menjadi langka. Dan ketika kelangkaan ini terjadi, manusia akan mengalami kerugian berkali-kali lipat. Tidak hanya di sektor pertanian, tapi di segala sektor. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, kegiatan dan pembangunan di sektor apapun, hendaknya mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan menyertakan upaya-upaya konservasi lingkungan ke dalamnya. Redaksi tidak lupa mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idulfitri 1438 H yang akan jatuh pada akhir Juni 2017. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan berdamai dengan alam dan sesama.

Selamat membaca.



Redaksi
Potrowanen RT 04/RW02
Donohudan, Ngemplak, Boyolali- 57375



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Resmikan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meresmikan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan tanggal 7 Juni 2017 di Gedung Gradhika Bakti Praja. Guna mensinergikan program dan kebijakan di Jawa Tengah untuk mendukung pengelolaan lanskap (kawasan) secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan, khususnya namun tidak terbatas pada produksi pangan, sejumlah instansi di Jawa Tengah bersama lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan akademisi telah membentuk suatu platform yang dinamakan Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan.

Peresmian ini merupakan bagian dalam diskusi panel “Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan di Propinsi Jawa Tengah” yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan, Kependudukan dan Catatan Sipil tingkat Propinsi Jawa Tengah dan seluruh kabupaten/kota di provinsi ini, perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, instansi-instansi pemerintah terkait di Jawa Tengah, petani dari beberapa kabupaten, akademisi, dan sektor swasta.

Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan merupakan pengembangan Forum Kedelai Berkelanjutan Jawa Tengah yang dibentuk tahun 2015. Forum ini fokus pada upaya peningkatan produksi kedelai di Jawa Tengah secara berkelanjutan. Kemudian sejak Januari 2016, rangkaian diskusi yang dilakukan membentuk kesadaran bahwa pembangunan pertanian – termasuk padi, jagung dan kedelai yang

merupakan komoditas pertanian utama di Jawa Tengah, tidak dapat berjalan efektif jika tanpa dukungan dari perbaikan di sektor atau wilayah lainnya. Selain itu, pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan memperhatikan keselarasan dengan lingkungan juga akan berdampak positif bagi sektor dan wilayah lain di sekitarnya.

Para pemangku kepentingan yang terlibat di dalam rangkaian diskusi ini memahami bahwa pembangunan sektoral tidak lagi sesuai untuk kondisi saat ini, dimana batasan tanggung jawab pengelolaan antar sektor semakin samar. Penyelesaian masalah di satu sektor atau wilayah mungkin memerlukan penyelesaian masalah di sektor atau wilayah lainnya. Oleh karena itu, peran aktif dan koordinasi para pemangku kepentingan sangat penting. Di sisi lain, kualitas alam ikut mempengaruhi kualitas kehidupan manusia, termasuk dalam hal akses terhadap pangan bergizi dan akses terhadap air.

Pada bulan April 2016, dengan difasilitasi oleh Business Watch Indonesia dan Solidaridad, forum ini mengadakan lokakarya lanskap berkelanjutan. Lokakarya ini merupakan langkah awal membangun kawasan berkelanjutan Jawa Tengah, yaitu dengan mensosialisasikan pendekatan lanskap kepada berbagai pemangku kepentingan dari berbagai sektor di Jawa Tengah. Salah satu agenda pemerintah Jawa Tengah yang didukung dengan terlaksananya pengelolaan lanskap (kawasan) secara lestari adalah terwujudnya ketahanan pangan di Jawa Tengah.

Pendekatan lanskap mencakup beragam sektor dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dalam lokakarya tersebut dikemukakan juga perlunya dibentuk sebuah untuk mensinergikan kegiatan, program, dan kebijakan para pemangku kepentingan di Jawa Tengah. Platform ini bernama Sekretariat Kawasan Pangan Berkelanjutan, dan memiliki sebuah tim inti yang beranggotakan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Universitas Jenderal Soedirman, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Kontak Tani Nelayan Andalan, Budi Mix Farming, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Yayasan Jateng Berdikari dan Business Watch Indonesia.

Masing-masing anggota platform memiliki komitmen untuk menjalankan kesepakatan yang dicapai dalam platform sesuai dengan kapasitasnya. Business Watch Indonesia misalnya, dengan dukungan dari instansi pemerintah melibatkan masyarakat untuk mengembangkan lanskap berkelanjutan Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pengenalan praktek pertanian sadar iklim kepada petani kedelai di 5 kabupaten penghasil kedelai, yaitu Sukoharjo, Klaten, Purworejo, Sragen, dan Wonogiri; agroforestri kopi dan konservasi hutan di kawasan Merapi yang termasuk dalam kabupaten Boyolali, Klaten, dan Magelang; peningkatan kapasitas petani perempuan; dan peningkatan kapasitas pendamping desa di beberapa kabupaten di DAS Serayu.

Peran Penting Wanita Petani Perempuan Wonogiri Manfaatkan Lahan Pekarangan untuk Kebun Sayur

WONOGIRI – Pembangunan lanskap tidak hanya melulu bicara tentang alam. Kualitas manusia, yang menjadi pelaku pengelolaan lanskap, turut menjadi komponen penting dalam pembangunan lanskap berkelanjutan. Bagi Desa Saradan, Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pertanian, petani merupakan salah satu pelaku utama dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan desa ini. Oleh karena itu, kapasitas dan kualitas petani perlu ditingkatkan, baik melalui pelatihan-pelatihan pertanian, tetapi juga melalui upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga petani.

Peningkatan kualitas hidup dapat melalui berbagai cara, di antaranya dengan membuka atau mempermudah akses kepada makanan bergizi. Beberapa penelitian menemukan bahwa kecukupan gizi mempengaruhi produktivitas petani. Tanpa gizi yang baik, petani rentan sakit

sehingga mengurangi hari produktif mereka. Dengan tujuan tersebut, maka pada 21 Februari 2017, KWT Wijaya Kusuma yang berlokasi di Desa Saradan, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, membuat kebun sayur kelompok. Kebun seluas 100 m² tersebut berlokasi di pekarangan rumah salah satu anggota kelompok. Pembuatan kebun sayur kelompok yang difasilitasi oleh Business Watch Indonesia ini melibatkan sekitar 10 orang anggota kelompok. Sekitar 20 keluarga juga ikut membuat kebun sayur di pekarangan rumah masing-masing.

Pada kegiatan tersebut, para perempuan menanam cabai dan terong. Hasil dari kebun sayur kelompok tersebut rencananya akan dipetik bersama-sama dan dibagikan ke anggota sebagai tambahan bahan makanan keluarga. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman, kebun sayur tersebut menggunakan pupuk organik yang

juga diproduksi oleh KWT Wijaya Kusuma. Selain itu, dengan mengurangi penggunaan agrokimia, sayuran yang dihasilkan juga lebih sehat.

Perempuan merupakan orang yang biasanya berperan penting dalam menentukan makanan yang disajikan untuk keluarga. Melalui pembuatan kebun sayur, petani perempuan di Desa Saradan diharapkan akan lebih mudah memperoleh dan menyajikan bahan-bahan makanan yang lebih bersih dan segar untuk menjaga kesehatan keluarga mereka.

Dengan memasak sayur dari kebun sayur sendiri, keluarga bisa mengalihkan pendapatan keluarga untuk membiayai kebutuhan lainnya, misalnya untuk membayar biaya sekolah dan membayar tunjangan kesehatan. Sebuah penelitian tahun 2011 oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian menyebutkan empat dampak positif pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebun sayur, yaitu:

i) Meningkatkan konsumsi energi dan konsumsi protein bagi rumah tangga petani secara nyata. Pada penelitian yang dilakukan, pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebun sayur telah meningkatkan konsumsi pangan dan skor PPH sebesar 11,90 – 20,46 persen.

- ii) Mengurangi pengeluaran untuk konsumsi pangan. Pengurangan pengeluaran kelompok pangan terbesar secara berturut-turut adalah sayuran, umbi, hasil ternak, dan ikan.
- iii) Meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pada penelitian yang dilakukan, hasil pekarangan berkontribusi terhadap 6,81 persen pendapatan keluarga.
- iv) Merangsang tumbuhnya ekonomi produktif di pedesaan, seperti (a) usaha pembibitan; (b) teknologi penetasan telur ayam arab; (c) kios saprodi; (d) usaha pengolahan hasil pertanian; dan (e) usaha dagang hasil pertanian.

Pemanfaatan pekarangan rumah masih memiliki prospek untuk dikembangkan. Data Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2011 mengungkapkan bahwa luas lahan pekarangan di Indonesia sekitar 10,3 juta hektar atau 14 persen dari keseluruhan luas lahan pertanian. Namun umumnya, lahan pekarangan tersebut sebagian besar belum dimanfaatkan untuk areal pertanaman, termasuk untuk kebun sayur.

